

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu tahun (Samuelson dan Nordhaus, 2004: 40). Tidak jauh berbeda, fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga demikian. Hanya saja PDB untuk tingkat nasional, sedangkan PDRB untuk daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode tertentu. Namun, kenaikan baik PDB pada tingkat nasional maupun PDRB di setiap provinsi saja belum cukup untuk menjelaskan apakah dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masalah yang muncul adalah ketimpangan distribusi pendapatan, yakni distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam sebuah negara. Kenyataan akan terjadinya ketimpangan antar wilayah di negeri ini masih menjadi tugas besar yang belum selesai. Menurut Tiara (2016) ketimpangan timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Padahal sejatinya, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ditandai oleh 3 hal fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin sedikit jumlah penduduk usia produktif yang

mengganggu. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar penduduk di suatu negara (Seers, 1972: 21).

Ketimpangan dapat terjadi karena perbedaan produktivitas setiap individu di mana satu individu atau kelompok memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Indeks Gini/Rasio Gini/Koefisien Gini merupakan koefisien yang angkanya berkisar dari 0 sampai 1 yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin mendekati 0, menandakan semakin meratanya distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin mendekati 1, distribusi pendapatannya semakin timpang. Empat faktor penyebab ketimpangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah ketimpangan peluang, ketimpangan pasar kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan.

Menurut Bahagijo (2017) ketimpangan pendapatan tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan namun juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah masih terpusat di wilayah Jawa saja sedangkan daerah di luar Jawa mengalami ketertinggalan. Dalam *Indonesia Development Forum (IDF) 2018* dicanangkan tujuh sub-tema yang akan berguna bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 yang terdiri dari pengembangan pusat pertumbuhan, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, perbaikan pelayanan dasar, pemanfaatan potensi ekonomi digital untuk dorong pembangunan daerah, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara

kepulauan, inovasi dalam tata kelola pemerintah daerah, serta mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan (Brodjonegoro, 2018).

Data Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa angka Rasio Gini dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan stagnan pada angka yang sama sebesar 0,41 sampai tahun 2014, walaupun kemiskinan relatif dan kemiskinan absolutnya menurun. Kesenjangan ekonomi ditandai dengan 20% penduduk terkaya menikmati 48,5% “kue” pembangunan (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI, 2013).

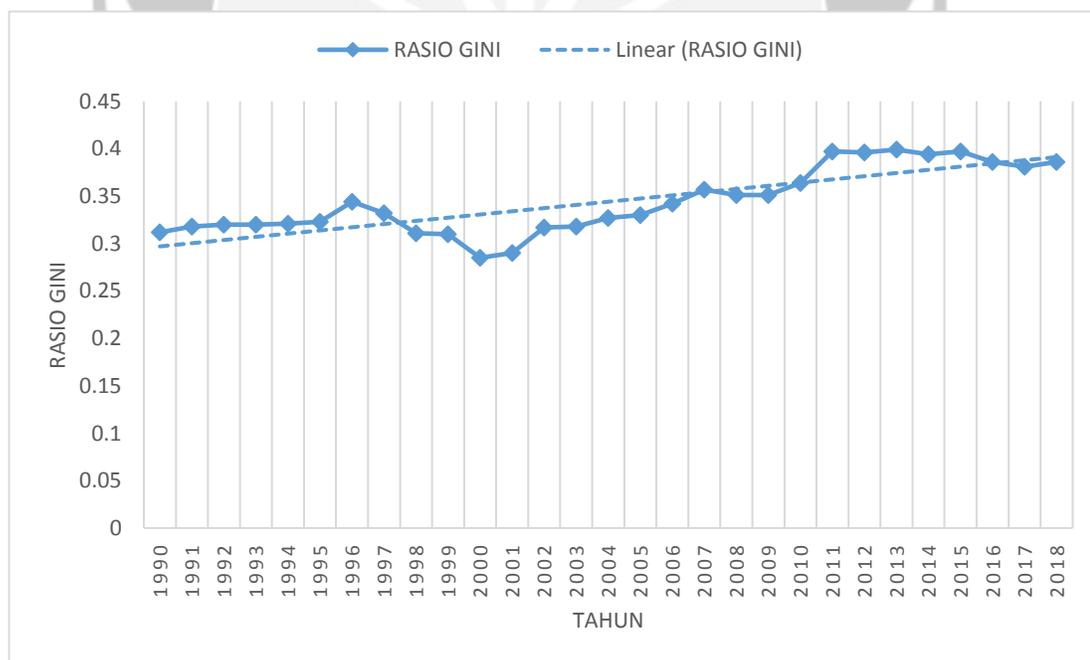
**Tabel 1.1**  
**Kemiskinan Indonesia dan Statistik Ketimpangan, 2007 – 2016**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kemiskinan Relatif (% dari populasi)</b>	16,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0	11,2	10,9
<b>Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)</b>	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28
<b>Koefisien Gini/Rasio Gini</b>	0,35	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016).

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Rasio Gini sudah mengalami tren peningkatan sejak tahun 2000. Penurunan Rasio Gini tahun 2015 dari 0,40 menjadi 0,39 pada 2016 disebabkan oleh beberapa hal seperti kenaikan pendapatan di antara kelas pendapatan menengah Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kenaikan ini berasal dari proyek pembangunan infrastruktur padat karya yang

dipimpin oleh pemerintah. Namun, penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di kelas berpenghasilan tinggi di Indonesia. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya harga komoditas, sehingga menyebabkan kaum elit bangsa ini mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Faktor lain yang berkontribusi positif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah program bantuan sosial pemerintah dan gaji pegawai negeri yang lebih tinggi. Meskipun mengalami penurunan ketimpangan, Rasio Gini Indonesia pada 2016 masih menempati peringkat keempat negara dengan kesenjangan tertinggi setelah Rusia, India, dan Thailand yang ditunjukkan oleh persentase kekayaan yang dimiliki oleh 1% warga negara yaitu 49,3% (*Credit Suisse, 2016*).



Sumber: *World Bank* (data diolah).

**Gambar 1.1**  
**Rasio Gini Indonesia, 1990 – 2018**

Meskipun demikian, kebijakan dalam mengatasi ketimpangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nampaknya membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan di Indonesia menduduki peringkat ketiga tercepat di antara negara anggota G-20. G-20 merupakan gabungan dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia (Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris) ditambah dengan Uni Eropa. Produk domestik bruto per kapita meningkat rata-rata 4% setiap tahun, setelah Tiongkok dan India, yang masing-masing tumbuh 9% dan 5,5% setiap tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi memicu peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pada tahun 1990-an, dengan produk domestik bruto per kapita (atas dasar harga konstan 2010 dalam US\$) yang berada dikisaran US\$1.621 – US\$2.071, Rasio Gini Indonesia berada di angka rata-rata 0,31 dan mencapai angka tertinggi sebesar 0,34 pada tahun 1996. Krisis moneter tahun 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis berdampak signifikan terhadap kalangan atas pada saat itu. Seiring dengan kenaikan produk domestik bruto per kapita sejak tahun 2000, nyatanya ketimpangan yang direpresentasikan oleh Rasio Gini juga ikut naik. Ketimpangan tersebut didorong oleh kelas konsumen, yaitu mereka yang berpendapatan bersih per tahun di atas US\$3.600 dan pengeluaran per hari sebesar US\$10 hingga US\$100 untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga

lainnya (Tjoe dalam Kompas, 2018). Pendapatan kelas konsumen ini meningkat karena dua faktor, yaitu kualifikasi pendidikan yang tinggi dan permintaan pasar terhadap tenaga kerja profesional terampil meningkat. Namun di sisi lain, orang-orang dengan pendidikan rendah semakin kesulitan memperoleh pekerjaan. Mereka bekerja di sektor informal dengan gaji yang rendah. *Gap* antara pekerja terampil dan non-terampil ini menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses pelayanan dan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, serta pendidikan.

Jika membandingkan data ketimpangan dan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto 34 provinsi di Indonesia, ternyata laju pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan. Provinsi-provinsi yang masuk ke 10 besar dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dari tahun ke tahun ternyata terdaftar juga ke dalam provinsi-provinsi dengan ketimpangan yang besar bahkan di atas angka Rasio Gini nasional. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Gorontalo, dan Papua adalah contoh-contoh provinsi yang memiliki laju pertumbuhan PDRB yang besar sekaligus nilai Gini yang tinggi.

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 menempati provinsi dengan Rasio Gini paling tinggi di antara 33 provinsi lainnya sebesar 0,427 padahal laju pertumbuhan PDRB-nya juga tinggi sebesar 8,13%. Sulawesi Selatan selalu masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan nilai Gini yang tertinggi dari 2011 sampai 2018 walaupun diikuti dengan laju pertumbuhan PDRB yang tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan Gorontalo pada tahun 2011 ditandai dengan Gini sebesar 0,40

dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 7,71% yang merupakan angka tertinggi ketujuh di antara provinsi-provinsi lainnya. Ketika laju pertumbuhan PDRB Gorontalo tahun 2012 naik menjadi 7,91%, Rasio Gini-nya juga ikut naik sebesar 0,413. Data laju pertumbuhan PDRB Papua tahun 2017 sebesar 4,64% dengan Rasio Gini sebesar 0,398. Saat laju pertumbuhan PDRB naik menjadi 7,33% pada tahun 2018, ketimpangan distribusi pendapatannya tetap di angka 0,398. Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata laju pertumbuhan PDRB yang meningkat belum tentu menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan. Ketimpangan masih menjadi tantangan bagi banyak provinsi di Indonesia.

Menurut Supriyantoro (2005) ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Pengurangan ketimpangan menjadi isu yang penting karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Ketimpangan yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan menyebabkan pengumpulan kekayaan antara golongan terkaya semakin terasa. Dampak lanjutan dari ketimpangan distribusi pendapatan juga akan berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. Semakin tinggi kesenjangan pendapatan, semakin besar kemungkinan terjadinya masalah sosial. Tingkat kesenjangan pendapatan berkorelasi dengan ketidakstabilan ekonomi, krisis finansial, beban utang, dan inflasi.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Gini 34 Provinsi di Indonesia, 2010-2018**

NO	PROVINSI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	0,301	0,326	0,341	0,331	0,320	0,330	0,330	0,392	0,318
2	Sumatera Utara (Sumut)	0,346	0,305	0,331	0,328	0,320	0,340	0,320	0,355	0,311
3	Sumatera Barat (Sumbar)	0,325	0,332	0,355	0,351	0,330	0,340	0,330	0,312	0,305
4	Riau	0,326	0,324	0,383	0,393	0,350	0,360	0,350	0,325	0,347
5	Jambi	0,304	0,348	0,359	0,327	0,330	0,360	0,350	0,334	0,335
6	Sumatera Selatan (Sumsel)	0,340	0,401	0,397	0,375	0,400	0,360	0,350	0,365	0,341
7	Bengkulu	0,365	0,372	0,360	0,372	0,360	0,380	0,360	0,349	0,355
8	Lampung	0,360	0,322	0,356	0,356	0,350	0,380	0,360	0,333	0,326
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,296	0,320	0,311	0,307	0,300	0,280	0,280	0,276	0,272
10	Kepulauan Riau (Kepri)	0,293	0,379	0,393	0,380	0,400	0,360	0,350	0,359	0,339
11	DKI Jakarta	0,361	0,402	0,437	0,404	0,430	0,430	0,410	0,409	0,390
12	Jawa Barat (Jabar)	0,356	0,380	0,422	0,406	0,410	0,410	0,410	0,393	0,405
13	Jawa Tengah (Jateng)	0,341	0,357	0,372	0,390	0,380	0,380	0,370	0,365	0,357
14	DI Yogyakarta	0,407	0,423	0,449	0,416	0,420	0,430	0,420	0,440	0,422
15	Jawa Timur (Jatim)	0,337	0,351	0,362	0,368	0,370	0,420	0,400	0,415	0,371
16	Banten	0,419	0,394	0,384	0,380	0,400	0,400	0,390	0,379	0,367
17	Bali	0,366	0,387	0,397	0,440	0,420	0,380	0,370	0,379	0,364
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	0,396	0,366	0,354	0,349	0,380	0,370	0,360	0,378	0,391
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	0,378	0,330	0,358	0,344	0,360	0,340	0,340	0,359	0,359
20	Kalimantan Barat (Kalbar)	0,370	0,363	0,395	0,384	0,390	0,330	0,340	0,329	0,325
21	Kalimantan Tengah (Kalteng)	0,304	0,334	0,332	0,358	0,350	0,330	0,330	0,327	0,344
22	Kalimantan Selatan (Kalsel)	0,366	0,353	0,364	0,356	0,360	0,350	0,330	0,347	0,340
23	Kalimantan Timur (Kaltim)	0,368	0,323	0,363	0,366	0,350	0,320	0,320	0,333	0,342
24	Kalimantan Utara (Kaltara)	0,340	0,341	0,403	0,357	0,360	0,290	0,300	0,313	0,304
25	Sulawesi Utara (Sulut)	0,370	0,358	0,430	0,446	0,420	0,370	0,390	0,394	0,372
26	Sulawesi Tengah (Sulteng)	0,366	0,388	0,387	0,391	0,370	0,370	0,360	0,345	0,317
27	Sulawesi Selatan (Sulsel)	0,404	0,427	0,418	0,432	0,420	0,420	0,430	0,429	0,388
28	Sulawesi Tenggara (Sultra)	0,421	0,389	0,403	0,391	0,410	0,400	0,400	0,404	0,392
29	Gorontalo	0,431	0,400	0,413	0,445	0,410	0,420	0,420	0,405	0,417
30	Sulawesi Barat (Sulbar)	0,364	0,371	0,335	0,324	0,350	0,360	0,360	0,339	0,366
31	Maluku	0,329	0,356	0,382	0,347	0,350	0,340	0,350	0,321	0,326
32	Maluku Utara	0,336	0,343	0,306	0,320	0,320	0,280	0,290	0,330	0,336
33	Papua Barat	0,381	0,374	0,407	0,418	0,440	0,440	0,370	0,387	0,391
34	Papua	0,414	0,384	0,446	0,441	0,410	0,420	0,390	0,398	0,398

Sumber: Badan Pusat Statistik Tiap Provinsi (data diolah).

*The Equality Trust Research Digest* (2011) mengungkapkan bahwa ketimpangan akan mempengaruhi seseorang dalam melihat orang-orang di sekitarnya. Ketimpangan juga berpengaruh pada tingkat kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seseorang. Hidup dalam masyarakat yang tidak merata akan menyebabkan stres dan kecemasan. Selanjutnya, masyarakat dengan kesenjangan yang tinggi cenderung memiliki mobilitas yang rendah. Riset *International Monetary Fund* (IMF)

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat adalah tantangan, baik bagi negara maju maupun negara sedang berkembang (Gopinath dalam Bisnis, 2019). Oleh karena itu, ketimpangan menjadi sebuah tantangan sejak dahulu hingga sekarang bagi dunia internasional.

Hipotesis Kuznets mengatakan bahwa distribusi pendapatan pada awal suatu negara bertumbuh perekonomiannya adalah tidak merata dan kemudian mencapai suatu puncak, lalu kembali tidak merata seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Maka kurva Kuznets menjadi berbentuk U terbalik. Studi mengenai ketimpangan pendapatan sebelumnya oleh Sulaiman *et al.* (2017) menguji pengaruh variabel independen berupa pendapatan per kapita, *foreign direct investment* (investasi asing langsung), *trade openness*, dan *secondary enrolment* terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan lewat penelitian yang dilakukan di negara Malaysia.

Studi berikutnya dilakukan oleh Dobson dan Ramlogan (2009) yang menggunakan variabel bebas berupa produk domestik bruto per kapita, tingkat partisipasi sekolah dasar, korupsi, keterbukaan perdagangan, privatisasi, porsi pertanian terhadap total output dan inflasi terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan dengan obyek penelitian yaitu negara Amerika Latin. Rahmah (2010) mengangkat dampak inflasi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia tahun 1976 – 2008. Selanjutnya, penelitian Adam (2018) mengenai dampak dana desa dan transfer fiskal terhadap ketimpangan pendapatan dengan membandingkan kabupaten/kota 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan non

3T Papua Barat. Berangkat dari studi-studi terkait tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, Inflasi Daerah, dan *Dummy* Dana Desa terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018?
2. Bagaimana pengaruh inflasi daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018?
3. Bagaimana pengaruh *dummy* dana desa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh inflasi daerah sebagai variabel moneter terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *dummy* dana desa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018

sehingga dapat diketahui apakah ada perubahan yang signifikan setelah dana desa diimplementasikan oleh pemerintah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah

Penelitian bisa dipertimbangkan sebagai salah satu referensi dalam membuat kebijakan terkait ketimpangan distribusi pendapatan, PDRB, inflasi, serta tidak lupa menyoroti persoalan implementasi dana desa.

2. Bagi pembaca

Penelitian diharapkan dapat membuka pandangan pembaca (masyarakat) untuk lebih peduli terhadap fakta ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia sehingga turut berpartisipasi dalam mengurangi angka ketimpangan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait ke depannya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Usulan penelitian ini terbagi ke dalam V bagian, dengan masing-masing bagian berisi:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi landasan teori, penelitian sebelumnya, dan hipotesis.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan data, sumber data, alat analisis, model, dan batasan operasional.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terpadu.

### BAB V: PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran.

